

ABSTRAK

PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGELAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Oleh

SITI NUR ROSYHIDAH

KPP Pratama Kotabumi bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab perpajakan terutama untuk mencegah pengelakan PPN. Kewajiban pembayaran pajak diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukum yang mengatur kewajiban perpajakan untuk kepentingan negara. Wilayah pelayanan KPP Pratama Kotabumi meliputi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Mesuji. Permasalahan yang dihadapi oleh penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi dalam mencegah terjadinya pengelakan PPN? (2) Apa sajakah faktor yang mempengaruhi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi dalam mencegah terjadinya pengelakan PPN?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Data diolah melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Peranan KPP Pratama Kotabumi dalam mencegah terjadinya pengelakan pajak sudah berjalan secara aktif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, serta melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap laporan pajak untuk memastikan akurasi dan kepatuhan dalam pelaporan. Upaya sosialisasi diarahkan untuk megantisipasi potensi pelanggaran di masa mendatang. Kerjasama KPP Pratama Kotabumi dengan Pemerintah Daerah juga terbukti efektif dalam meningkatkan penegakan hukum perpajakan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi KPP Pratama Kotabumi dalam melakukan upaya mencegah terjadinya pengelakan PPN mencakup 2 Faktor yakni Faktor internal yang disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan kualitas pegawai dan Faktor eksternal, antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan tantangan geografis yang dihadapi dengan cakupan wilayah pelayanan yang luas.

Kata Kunci: Pengelakan Pajak; PPN; Ketidakpatuhan Pajak; Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama; Pelayanan dan Pengawasan Pajak.

ABSTRACT

PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGELAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

By

SITI NUR ROSYHIDAH

The Kotabumi Pratama Tax Office is tasked with increasing public awareness of tax responsibilities, especially to prevent VAT evasion. The obligation to pay taxes is regulated in Article 23 A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the legal basis governing tax obligations for the benefit of the state. The service area of the Kotabumi Pratama Tax Office includes North Lampung, West Lampung, West Coast, Tulang Bawang, West Tulang Bawang, Way Kanan, and Mesuji Regencies. The problems faced by this study are: (1) What is the role of the Kotabumi Pratama Tax Office in preventing VAT evasion? (2) What are the factors that influence the Kotabumi Pratama Tax Office in preventing VAT evasion?

The research method used is an empirical legal approach with data collection techniques through field studies and literature studies. Data is processed through the process of identification, classification, and compilation. The data analysis used is descriptive qualitative..

The results of this study are: (1) The role of the Kotabumi Pratama Tax Office in preventing tax evasion has been actively carried out by providing socialization to taxpayers regarding tax obligations, as well as implementing strict supervision and inspection of tax reports to ensure accuracy and compliance in reporting. Socialization efforts are directed at anticipating potential violations in the future. Cooperation between the Kotabumi Pratama Tax Office and the Regional Government has also proven effective in improving tax law enforcement. (2) The factors that influence the Kotabumi Pratama Tax Office in making efforts to prevent VAT evasion include 2 factors, namely internal factors caused by limited human resources and employee quality and external factors, including low taxpayer awareness of tax obligations and geographical challenges faced with a wide service area.

Keywords: Tax Evasion; VAT; Tax Non-Compliance; Tax Service Office (KPP) Pratama; Tax Services and Supervision.